

BAB VII

PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2010—2014

7.1 Kondisi Wilayah Maluku Saat Ini

7.1.1 Capaian Pembangunan Wilayah

Dalam kurun waktu 2004—2008 perekonomian wilayah Maluku mengalami pertumbuhan yang tidak terlalu tinggi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku dalam periode 2004—2008 mencapai 4,96 persen dan Provinsi Maluku Utara mencapai 5,46 persen. Gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi wilayah Maluku dapat dilihat pada Tabel 7.1 sebagai berikut.

TABEL 7.1
PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH MALUKU TAHUN 2004 - 2008
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 (DALAM PERSEN)

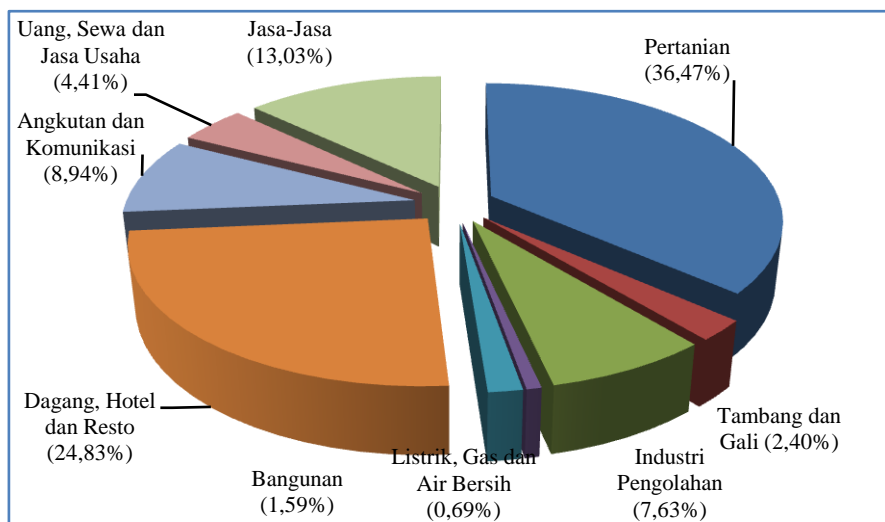
Tahun	Maluku	Maluku Utara
2004	4,4	4,7
2005	5,1	5,1
2006	5,5	5,5
2007	5,6	6,0
2008	4,2	6,0

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari sumbangan sektor ekonomi di wilayah Maluku pada triwulan 1 tahun 2008 (**Gambar 7.1**), peringkat tiga penyumbang terbesar adalah pertanian, perdagangan, hotel, restoran serta jasa-jasa. Sumbangan sektor-sektor tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lebih dari 50 persen. Wilayah Maluku memiliki sektor perekonomian berbasis kekayaan sumber daya alam perkebunan, perikanan yang kemudian mendorong berkembangnya berbagai sektor lainnya. Sementara itu, sektor dengan kontribusi terendah adalah sektor listrik, gas, air bersih, dan bangunan. Masih belum tercukupinya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan ekonomi seperti transportasi serta sarana dan prasarana industri menjadi kendala dalam mengoptimalkan sektor-sektor unggulan di wilayah Maluku.

Wilayah Maluku memiliki potensi pengembangan yang sangat besar berbasis sumber daya alam terutama perikanan dan wisata bahari. Potensi sumber daya perikanan laut sangat besar, tetapi belum dikelola secara optimal. Potensi sumber daya lahan, hutan dan perkebunan juga cukup besar sehingga masih ada peluang pengelolaan sumber daya tersebut untuk pengembangan ekonomi wilayah. Pemanfaatan dan pengelolaan berbagai sumber daya tetap harus mempertimbangkan keterpaduan dan keseimbangan dalam penataan ruang wilayah untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan, dan mendorong penyebaran dampak perekonomian ke seluruh wilayah.

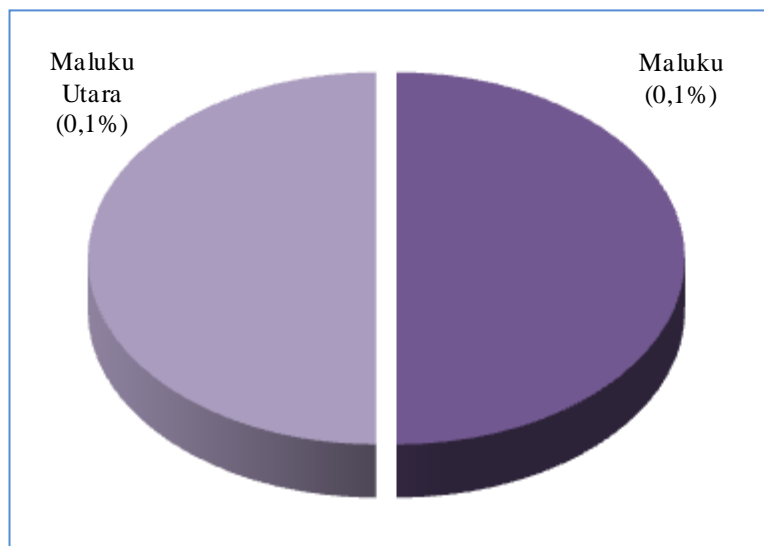
GAMBAR 7.1
KONTRIBUSI EKONOMI WILAYAH MALUKU MENURUT SEKTOR
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TRIWULAN I TAHUN 2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Secara keseluruhan kontribusi perekonomian wilayah Maluku terhadap perekonomian nasional pada tahun 2008 sekitar 0,2 persen. Sementara itu, kontribusi perekonomian provinsi di wilayah Maluku terhadap perekonomian wilayah nasional adalah sebesar 50 persen dari Provinsi Maluku dan 50 persen dari Maluku Utara. Meskipun masih memiliki kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional yang rendah, provinsi di wilayah Maluku memiliki potensi yang cukup tinggi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan karakteristik lokasi wilayah dan sumberdaya alam yang dimiliki.

GAMBAR 7.2
KONTRIBUSI EKONOMI WILAYAH MALUKU TERHADAP EKONOMI NASIONAL
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Investasi di wilayah Maluku didominasi oleh sektor perkebunan, perikanan, pertambangan dan penggalian, perdagangan, hotel dan restoran. Di provinsi Maluku Utara investasi didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, perkebunan, perdagangan, hotel dan restoran. Perkembangan investasi berupa penanaman modal asing (PMA) di wilayah Maluku terhadap total PMA nasional masih sangat rendah. Kondisi yang sama terjadi pada PMDN yang masih cukup rendah. Meskipun investasi masih tergolong rendah, namun perkembangan perdagangan luar negeri provinsi Maluku dan Maluku Utara terus mengalami peningkatan. Antara tahun 2002 dan 2006, nilai ekspor provinsi Maluku telah meningkat sebesar 22 persen atau rata-rata sekitar 5 persen per tahun.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, PDRB perkapita wilayah Maluku terus mengalami peningkatan yang signifikan, tetapi pendapatan perkapita wilayah Maluku masih sangat rendah jika dibanding dengan wilayah yang lain (**Tabel 7.2**).

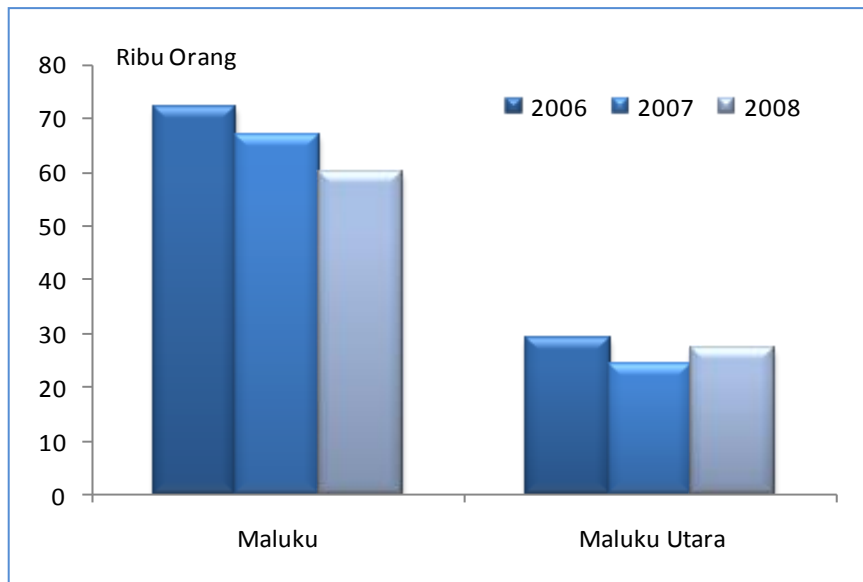
TABEL 7.2
PDRB PERKAPITA DENGAN MIGAS WILAYAH MALUKU TAHUN 2004—2008
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 (DALAM RIBU RUPIAH)

Tahun	Maluku	Maluku Utara
2004	2,494	2,438
2005	2,577	2,447
2006	2,680	2,540
2007	2,791	2,649
2008	2,867	2,762

Sumber : Badan Pusat Statistik

Jumlah penduduk di wilayah Maluku adalah sekitar 2,4 juta jiwa atau 1,1 persen dari total penduduk nasional, dengan kepadatan 30 jiwa per km². Persebaran penduduk di wilayah Maluku tidak merata. Pada wilayah pulau-pulau kecil cenderung padat sedangkan di pulau besar penduduknya jarang. Sebagian besar penduduk Maluku tersebar di perdesaan. Jumlah pengangguran di Maluku masih tergolong tinggi. Jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Maluku tahun 2008 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Maluku Utara. Jumlah pengangguran di Provinsi Maluku tahun 2008 sebanyak 60 ribu jiwa, sedangkan di Maluku Utara sebanyak 27 ribu jiwa. Pengangguran dan kemiskinan di wilayah Maluku, erat kaitannya dengan dampak dari konflik sosial berkepanjangan sejak tahun 1999, terutama di Provinsi Maluku. Para pengungsi yang masih tersebar juga belum pulih dari trauma konflik bertahun-tahun tersebut. Pengangguran di Provinsi Maluku Utara dipengaruhi oleh angkatan kerja dan pengangguran pada tahun sebelumnya. Respon pengangguran terhadap angkatan kerja adalah elastis baik jangka pendek maupun jangka panjang.

GAMBAR 7.3
JUMLAH PENGANGGURAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2006—2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Di samping masih tingginya angka pengangguran, angka kemiskinan pun menunjukkan angka yang masih tinggi walaupun mengalami penurunan dari rentang waktu tahun 2007—2009 . Persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku sebesar 28,2 persen di tahun 2009 dan di Provinsi Maluku Utara sebesar 10,4 persen di tahun 2009 (**Tabel 7.3**). Tingginya angka kemiskinan berkaitan dengan belum memadainya jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan.

TABEL 7.3
PERSENTASE KEMISKINAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2007—2009

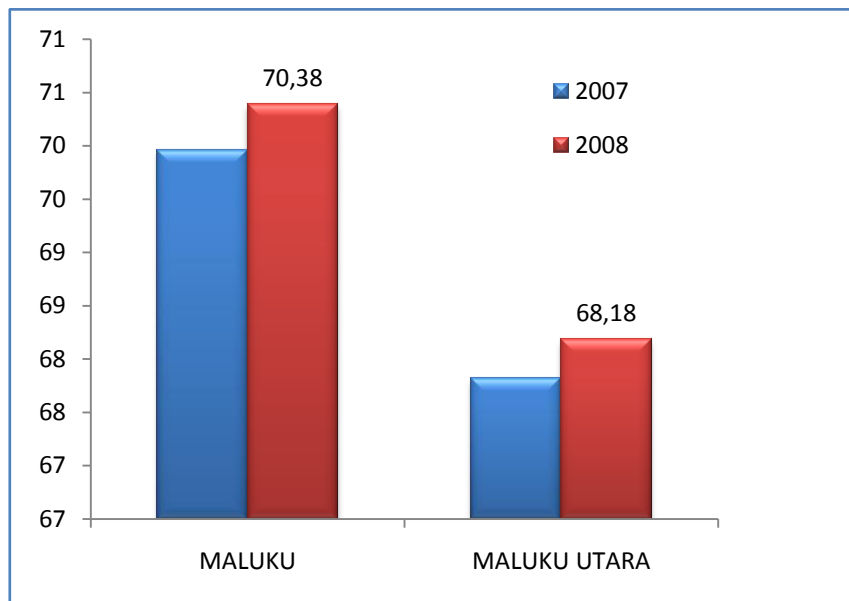
Tahun	Maluku	Maluku Utara
2007	31,1	12,0
2008	29,7	11,3
2009	28,2	10,4

Sumber : Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) wilayah Maluku tergolong menengah ke

atas, yaitu mencapai 70,38 pada tahun 2008 di Provinsi Maluku, dan 68,18 di Maluku Utara. Dalam perkembangan IPM, persoalannya lebih banyak muncul dalam aspek kesehatan. Perkembangan IPM Wilayah Maluku pada tahun 2007—2008 dapat dilihat pada Gambar 7.4 sebagai berikut.

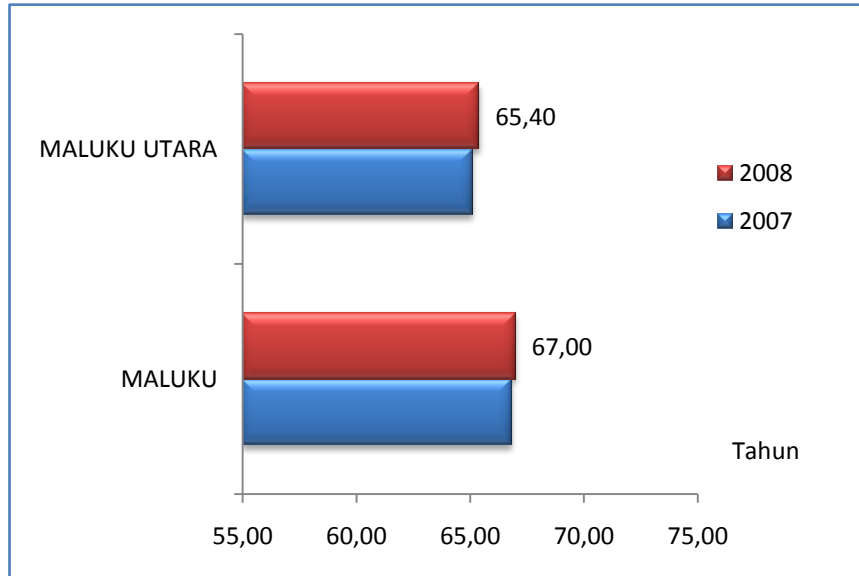
GAMBAR 7.4
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA WILAYAH MALUKU TAHUN 2007-2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Dalam aspek kesehatan, nilai Umur Harapan Hidup (UHH) di wilayah Maluku masih tergolong rendah. Nilai UHH di Provinsi Maluku pada tahun 2008 adalah 67 tahun dan di provinsi Maluku Utara adalah 65,40 tahun. Di wilayah Maluku, dihadapi permasalahan berupa rendahnya pemenuhan gizi ibu, bayi, dan balita dari keluarga miskin, serta rendahnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat. Permasalahan ini disebabkan oleh kurang optimalnya pelayanan kesehatan sebagai konsekuensi dari jauhnya lokasi pelayanan dari pusat layanan, kurangnya sarana transportasi, serta kurang memadainya sarana kesehatan dan tenaga kesehatan.

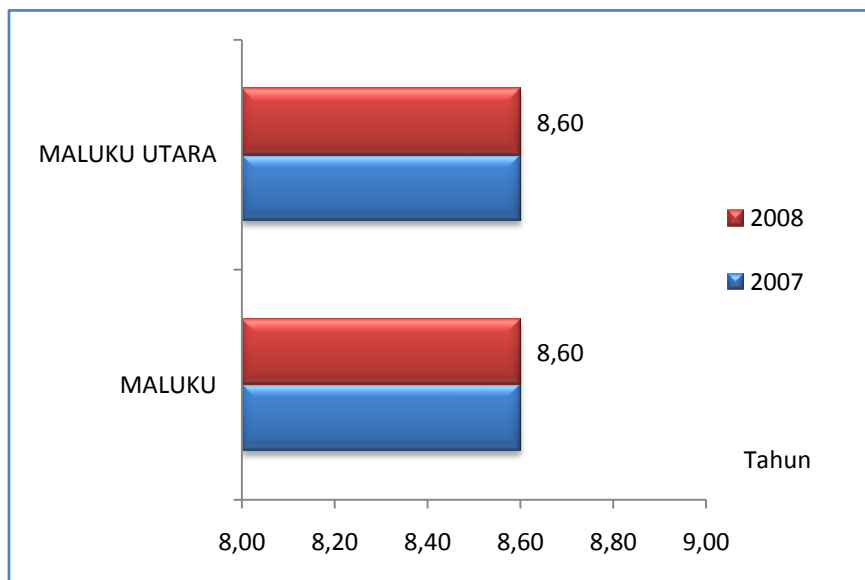
GAMBAR 7.5
UMUR HARAPAN HIDUP WILAYAH MALUKU TAHUN 2007—2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Di wilayah Maluku masih terdapat masalah pendidikan sebagaimana diindikasikan oleh angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang masih rendah. Nilai RLS tahun 2008 di Provinsi Maluku dan Maluku Utara adalah 8,60 tahun. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di wilayah Maluku dapat dilihat pada Gambar 7.6 sebagai berikut.

GAMBAR 7.6
RATA-RATA LAMA SEKOLAH WILAYAH MALUKU TAHUN 2007-2008

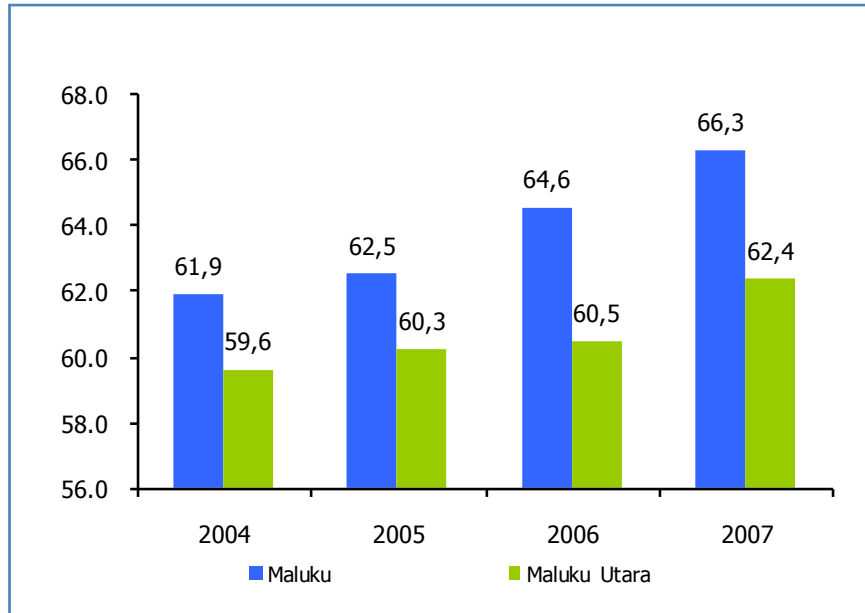


Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Demikian juga dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) (*Gender-related Development Index/GDI*) Indonesia, yang dihitung berdasarkan variabel yang sama dengan IPM menurut jenis kelamin. IPG di wilayah Maluku mengalami peningkatan pada tahun 2007. IPG di Provinsi Maluku; yaitu sebesar 66,3, berada di atas rata-rata nasional sebesar 65,8. Sementara, di Maluku Utara nilai tersebut masih di bawah rata-rata nasional sebesar 62,4. Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya persentase kontribusi dalam pendapatan dan umur harapan hidup perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan gender antarprovinsi di wilayah Maluku.

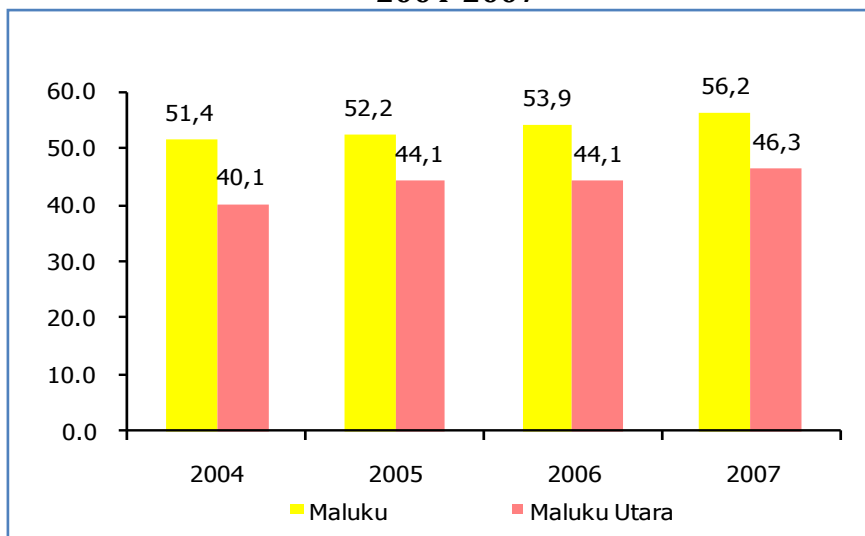
Selain indikator IPG, pembangunan gender juga ditunjukkan dengan indikator *Gender Empowerment Measurement* (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Di wilayah Maluku, IDG tahun 2007 masing-masing provinsi juga mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun 2006. Meskipun nilainya masih lebih rendah dengan rata-rata nasional sebesar 62,1. Nilai IDG untuk Provinsi Maluku dan Maluku Utara masing-masing sebesar 56,2 dan 46,3. Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, proporsi perempuan dalam pekerjaan profesional, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan upah nonpertanian perempuan. Di samping itu, upaya-upaya perlindungan perempuan dan anak, terutama terhadap berbagai tindak kekerasan, juga perlu ditingkatkan, mengingat bahwa hal tersebut merupakan salah satu prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat.

GAMBAR 7.7
PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER WILAYAH MALUKU TAHUN
2004-2007



Sumber: BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (diolah)

GAMBAR 7.8
PERKEMBANGAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER WILAYAH MALUKU TAHUN
2004-2007



Sumber: BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan



Pengembangan wilayah Maluku, sebagai salah satu wilayah kepulauan dengan gugusan pulau kecil yang tersebar dan berbatasan dengan negara tetangga, perlu dilakukan dengan kebijakan dan program yang terpadu dan tepat sesuai dengan potensi yang dimiliki dan berbagai hambatan yang dihadapi. Tantangan terbesar adalah memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh wilayah pulau, dan sekaligus membangun keterkaitan antarwilayah pulau dalam satu kesatuan tata ruang wilayah pulau dan laut. Kondisi kepulauan yang tersebar seringkali membuat program pembangunan yang dilaksanakan hanya terfokus pada satu atau beberapa pulau tertentu dengan alokasi program yang tidak memperhatikan keutuhan dan keterpaduan program dalam satu kesatuan tata ruang.

Provinsi Maluku dan Maluku Utara menghadapi permasalahan yang sangat kompleks terutama sebagai akibat ketertinggalan dan keterisolasian. Selain itu, wilayah Maluku tersebar dan dipisahkan oleh perairan sehingga menyebabkan program pembangunan cenderung hanya terpusat pada pulau yang menjadi pusat pemerintahan daerah dan kurang menyebar ke pulau-pulau lainnya. Wilayah yang tersebar juga menghambat mobilitas orang dan barang sebagai akibat dari minimnya jaringan transportasi. Kondisi ini juga menyebabkan rendahnya pengawasan dan pengendalian kondisi ketertiban dan keamanan wilayah, serta memunculkan potensi konflik dan separatisme. Dengan kondisi wilayah yang tersebar dan berbagai hambatan tersebut, pengembangan wilayah Maluku akan memperhitungkan secara sungguh-sungguh karakteristik Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai suatu kesatuan wilayah kepulauan yang saling berhubungan. Selain itu, optimalisasi koordinasi dan sinergi berbagai kebijakan dan program pembangunan sektoral diarahkan untuk memperkuat keterkaitan antarwilayah.

Wilayah Maluku telah mampu meningkatkan produktivitas padi sawah, tetapi hasil produksinya masih belum dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya intensifikasi pertanian. Kekurangan pangan yang dibutuhkan masih perlu dipasok dari luar daerah. Potensi pengembangan lahan pertanian padi sawah masih besar sehingga produksi padi di wilayah Maluku masih berpeluang untuk ditingkatkan. Hal ini didukung oleh pengembangan kawasan sentra produksi (KSP) padi sawah antara lain di Maluku Tengah dan Pulau Buru, di Provinsi Maluku, dan Maluku Utara.

Provinsi Maluku memiliki potensi pengolahan hasil laut. Sebagian besar masyarakat wilayah Maluku hidup di wilayah perairan dengan sektor perikanan sebagai mata pencaharian mereka. Sektor ini sangat potensial mengingat wilayah Maluku merupakan kepulauan dengan perairan yang sangat luas. Hasil perikanan terdiri atas perikanan tangkap dan hasil perikanan budidaya yang dilakukan oleh masyarakat. Produksi ikan budidaya masih jauh lebih kecil jika dibanding dengan produksi ikan hasil tangkapan, yang didukung oleh sumberdaya laut yang luas. Kegiatan budidaya perikanan di wilayah Maluku terdiri atas budidaya laut, budidaya tambak, budidaya kolam, dan budidaya karamba. Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya



perlu diarahkan di Kabupaten Maluku Tenggara (Maluku), Maluku Utara dan Halmahera Tengah (Maluku Utara). Permasalahannya ialah masih terbatasnya sarana penangkapan, baik berupa armada, kotak pendingin, maupun tempat penyimpanan pendinginan. Hal ini mengakibatkan kualitas produk perikanan masih rendah jika dibandingkan dengan negara lainnya, begitu pula sistem informasi pemasaran masih belum memadai.

Di Provinsi Maluku Utara terdapat potensi pengolahan hasil kelapa, dengan areal perkebunan kelapa yang mampu menghasilkan kopra dalam jumlah sangat besar. Namun, permasalahan yang dihadapi ialah kurangnya keterampilan para petani sehingga mutu kopra masih rendah. Sebagian besar petani hanya mengolah kelapa menjadi kopra yang kemudian dipasarkan antarprovinsi. Selain itu, banyak pohon kelapa yang sudah tidak produktif sehingga membutuhkan peremajaan tanaman.

Wilayah Maluku masih memiliki permasalahan terkait dengan rendahnya kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana dan prasarana, khususnya untuk jalan dan jembatan, serta sarana transportasi. Selain itu, kurangnya keterpaduan transportasi antarmoda menjadi permasalahan utama, khususnya ketersediaan transportasi darat, laut, sungai, dan udara yang belum memadai. Minimnya infrastruktur yang dibangun juga mengakibatkan keterisolasian wilayah antarpulau dan dalam pulau. Di wilayah Maluku, jaringan jalan di pulau-pulau terpencil belum sepenuhnya berfungsi untuk mendukung transportasi lintas pulau dan melayani mobilitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah serta mengurangi kemiskinan. Adapun jalan desa yang dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun masih belum memadai. Selain itu, armada angkutan jalan raya sangat terbatas karena armada yang tersedia tidak sebanding dengan luas daratan pada setiap kabupaten. Jangkauan kapal PELNI, kapal ferry, perintis, dan kapal pelayaran rakyat (Pelra) masih sangat terbatas dan tidak memadai untuk kondisi geografis wilayah Maluku yang terdiri atas pulau-pulau kecil, sedang, dan besar.

Sementara itu, permasalahan sumber daya alam yang perlu segera ditangani menyangkut perusakan hutan, pembalakan hutan, dan kebakaran hutan. Permasalahan utama lainnya adalah kecenderungan terjadinya beberapa bencana alam, seperti banjir, longsor dan kekeringan akibat perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan juga terjadinya perubahan iklim global. Berbagai permasalahan tersebut dapat diakibatkan oleh eksploitasi terhadap sumber daya alam, seperti kegiatan penambangan, eksploitasi sumber daya laut dan pantai, serta buruknya manajemen daerah aliran sungai.

Penggunaan tanah di wilayah Maluku didominasi oleh kawasan hutan sebanyak 60,7 persen, baik di Provinsi Maluku maupun di Maluku Utara yang masing-masing 73,3 persen luas lahan Provinsi Maluku Utara dan 53,3 persen dari total luas daratan Provinsi Maluku. Secara umum penggunaan lahan di wilayah Maluku masih belum termanfaatkan secara intensif dan masih sangat potensial untuk meningkatkan peruntukan/pemanfaatan lahan untuk perkebunan, pertanian lahan kering, dan persawahan. Sebagian besar lahan kawasan lindung masih belum ditetapkan dengan

peraturan pemerintah dan masih tersedia untuk penggunaannya sesuai dengan kesesuaiannya, karena luas wilayah Provinsi Maluku masih sangat besar jika dibandingkan dengan Maluku Utara.

Wilayah perairan Kepulauan Maluku di bagian selatan berbatasan dengan negara Timor Leste dan Australia. Terdapat beberapa segmen garis batas yang belum disepakati antar RI dengan Timor Leste, sedangkan di bagian utara Kepulauan Maluku masih ada garis batas maritim yang belum disepakati antara Pemerintah RI dengan Filipina. Pada satu sisi terdapat mobilitas penduduk tradisional dari Timor Leste ke Pulau Wetar, Pulau Kisar (Kabupaten Maluku Barat Daya) dan Pulau Larat (Kabupaten Maluku Tenggara Barat).

GAMBAR 7.9
DAERAH TERTINGGAL DI WILAYAH MALUKU



Sumber : Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (diolah)

Di sisi lain perjanjian lintas batas RI-Timor Leste tidak memasukkan wilayah Maluku sebagai pintu lintas batas. Akibatnya penduduk yang melakukan mobilitas tradisional dianggap sebagai pendatang ilegal karena tidak dilengkapi dengan dokumen keimigrasian yang sah. Akan tetapi di sisi lain terjadi *illegal fishing* karena kurangnya pengamanan terhadap wilayah perairan. Dalam hal ini perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap penanganan kawasan perbatasan dan batas wilayah perlu/harus

ditingkatkan. Keterpaduan antarsektor dan antardaerah dalam penanganan kawasan perbatasan dan batas wilayah juga masih perlu ditingkatkan.

7.1.2 Isu Strategis

Dari uraian fakta, potensi dan permasalahan di wilayah Maluku, dapat ditarik beberapa isu strategis di wilayah Maluku sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan.

Hal ini ditunjukkan oleh belum optimalnya pengembangan industri pengolahan hasil laut di Provinsi Maluku, dan belum optimalnya penanganan industri pengolahan kelapa di Maluku Utara. Hal ini ditunjukkan pula oleh rendahnya akses terhadap infrastruktur pendukung ekonomi, khususnya akses terhadap jalan, akses terhadap pelabuhan, akses terhadap prasarana listrik, dan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana pos dan telematika.

2. Pembangunan wilayah perbatasan, tertinggal dan pulau terpencil, dan kawasan bencana.

Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan, rendahnya jumlah dan menurunnya persentase kredit usaha kecil di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, kurangnya akses penduduk terhadap sarana dan prasarana di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, dan luasnya kawasan bencana.

3. Rendahnya kinerja birokrasi dan tata kelola.

Hal ini berkaitan dengan rendahnya kapasitas Pemda dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik, dan secara khusus terkait dengan rendahnya akses masyarakat terhadap informasi tata ruang di Provinsi Maluku.

4. Kualitas sumberdaya manusia

Isu strategis ini berkaitan dengan rendahnya akses terhadap pendidikan dasar dan menengah, rendahnya status kesehatan dan gizi masyarakat, serta rendahnya pendapatan per kapita di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

5. Tingginya dampak konflik Maluku terhadap keamanan lingkungan, kehidupan sosial dan ekonomi, serta lingkungan.

Lebih jauh lagi muncul persentase yang tinggi pada pengangguran, kemiskinan, dan modal sosial sebagai konsekuensi dari konflik sosial di Provinsi Maluku.

6. Ketergantungan pasokan pangan dari luar wilayah sebagai konsekuensi menurunnya luas areal dan produksi tanaman pangan.

Hal ini berkaitan dengan rendahnya luas panen dan produksi tanaman pangan di Provinsi Maluku Utara.



7. Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana.

Hal ini berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan energi, dan tingginya perambahan hutan dan gangguan lingkungan.

7.2 Arah Pengembangan Wilayah

Dengan memperhatikan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kepulauan Maluku, pengembangan wilayah Maluku diarahkan untuk: (1) mengembangkan kota-kota pesisir sebagai pusat pelayanan kegiatan industri kemaritiman terpadu yang merupakan sektor basis dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai, khususnya transportasi, energi, dan sumber daya air; (2) mengembangkan wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah Kepulauan Maluku melalui kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terpadu yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai; (3) mempertahankan kawasan konservasi untuk menjamin daya dukung lingkungan yang optimal bagi pengembangan wilayah; (4) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Kepulauan Maluku melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat pertumbuhan di darat, pesisir, dan pulau-pulau kecil; (5) memanfaatkan sumber daya alam secara produktif dan efisien, agar terhindar dari pemborosan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip kelestarian; serta (6) meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut dan udara yang didukung oleh transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal dengan mengikutsertakan dunia usaha.

Pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Maluku ditekankan pada terbentuknya fungsi dan hirarki pusat permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara. Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di wilayah Maluku diarahkan untuk mengendalikan pengembangan kota Ambon dan Ternate – Sofifi sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di wilayah Maluku diarahkan untuk: (1) mengembangkan pusat industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan melalui pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan permukiman; (2) mengendalikan perkembangan kota Masohi, Namlea, dan Tual sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya; dan (3) mendorong pengembangan kota Tidore, Tobelo, Labuha, Sanana, Werinama, dan Kairatu sebagai pusat pelayanan sekunder.

Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di wilayah Maluku diarahkan untuk (1) meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana kota yang mendukung fungsi kota sebagai pusat pelayanan kawasan perdesaan di sekitarnya; (2) mendorong terciptanya keterkaitan sosial ekonomi antara kawasan perkotaan dan perdesaan yang saling menguntungkan; dan (3) prioritas penanganan kota-kota Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi masing-masing sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pusat permukiman Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kepulauan Maluku. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di wilayah Maluku diarahkan untuk mendorong perkembangan kota Ilwaki, Saumlaki, Daruba, dan Dobo sebagai pusat pelayanan sekunder.

7.3 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Berdasarkan arahan pengembangan wilayah Maluku, tujuan pembangunan wilayah Maluku untuk kurun waktu 2010—2014 adalah untuk:

1. meningkatkan standar hidup masyarakat Maluku dan Maluku Utara.
2. meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan sumber daya laut dan perkebunan di wilayah Maluku.
3. meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut maupun udara.
4. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Maluku bagian Utara dan bagian Selatan, wilayah darat, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Sasaran pengembangan wilayah Maluku untuk kurun waktu 2010—2014 adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya standar hidup masyarakat wilayah Maluku, yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, pengangguran serta pendapatan perkapita.
2. meningkatnya produksi dan produktivitas sektor perikanan di wilayah Maluku.
3. berkembangnya jaringan dan meningkatnya transportasi.
4. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Maluku bagian Utara dan bagian Selatan.
5. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah darat, pesisir dan pulau-pulau kecil.

TABEL 7.4
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
DI WILAYAH MALUKU TAHUN 2010—2014

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%) ¹⁾		Kemiskinan (%) ²⁾		Pengangguran (%) ³⁾	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014
Maluku	4,9 – 5,4	5,4 – 6,0	27,04 – 26,75	22,23 – 21,76	7,7 – 8,5	5,2 – 5,8
Maluku Utara	5,5 – 6,3	6,0 – 6,8	9,45 – 9,07	5,38 – 5,02	4,7 – 5,1	3,0 – 3,3

Sumber : Perhitungan Bappenas;BPS; Susenas;

*Keterangan: ¹⁾ *Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).*

²⁾ *Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.*

³⁾ *Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.*

TABEL 7.5
SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP,
RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN PENDAPATAN PERKAPITA
DI WILAYAH MALUKU TAHUN 2010—2014

Provinsi	Angka Kematian Bayi ¹⁾		Rata-Rata Lama Sekolah ²⁾		Angka Harapan Hidup ³⁾		Pendapatan Perkapita (Rp.Ribu) ⁴⁾	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014	2010	2014
Maluku	32	28	9,00	9,40	69,12	70,18	3,240.87	3,955.22
Maluku Utara	35	29	9,00	9,40	68,42	69,91	2,998.35	3,537.59

Sumber : Perhitungan Bappenas;BPS; Susenas;

*Keterangan: ¹⁾ *Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.*

²⁾ *Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.*

³⁾ *Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.*

⁴⁾ *Pendapatan per kapita: pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.*

7.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan

Berdasarkan arahan, tujuan, dan sasaran serta dengan mempertimbangkan isu strategis wilayah Maluku, maka arah kebijakan dan strategi wilayah Maluku kurun waktu 2010—2014 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sentra produksi komoditas unggulan, dengan strategi pengembangan:
 - a. meningkatkan produktivitas usaha perikanan tangkap dan budidaya.
 - b. diversifikasi produk ke arah ikan siap saji untuk pasar dalam dan luar negeri.
 - c. mengembangkan kluster industri perikanan dengan Ambon sebagai pusat industri pengolahan.
 - d. penganekaragaman produk olahan kelapa.
 - e. mengembangkan kluster industri kelapa dengan Sofifi sebagai pusat industri pengolahan.
2. Penguatan kedaulatan wilayah nasional melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan, dengan strategi pengembangan:
 - a. meningkatkan stabilitas keamanan kawasan perbatasan.
 - b. mengembangkan kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan, tertinggal dan pulau terpencil.
3. Peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan strategi pengembangan:
 - a. meningkatkan kualitas regulasi dan peraturan daerah.
 - b. meningkatkan penegakan hukum dan HAM termasuk penanganan kasus korupsi.
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung ketersediaan angkatan kerja berketerampilan dan berpendidikan tinggi, dengan strategi pengembangan:
 - a. meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan keterampilan kerja.
 - b. meningkatkan akses pelayanan kesehatan.
 - c. meningkatkan produktivitas angkatan kerja dan mengembangkan ekonomi lokal.
5. Peningkatan harmoni kehidupan masyarakat dengan kemajemukan agama dan golongan, dengan strategi pengembangan:



- a. meningkatkan kapasitas lembaga keswadayaan masyarakat (Maluku).
 - b. memulihkan modal sosial dan rasa saling percaya ditengah masyarakat (Maluku).
6. Percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat, dengan strategi pengembangan
- a. meningkatkan sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja.
7. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat wilayah, dengan strategi pengembangan:
- a. meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan.
 - b. memperkuat interaksi perdagangan antar wilayah.
 - c. diversifikasi pangan.
8. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, dengan strategi pengembangan:
- a. meningkatkan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
9. Peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi bencana alam, dengan strategi pengembangan:
- a. mitigasi bencana alam.